**BAB I**

**PENDAHULUAN**

* 1. **Latar Belakang**

Dalam rangka memenuhi ketentuan dalam sistem perencanaan pembangunan Kab. Langkat maka di susunlah Renstra Kantor Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Langkat tahun 2019-2024 dan mengalami perubahan sesuai dengan adanya perubahan RPJMD Kab. Langkat tahun 2019-2024.

Sesuai ketentuan Peraturan-Undangan pelaksanaan perubahan RPJMD dilakukan secara simultan dengan perubahan Renstra PD, hal ini disebabkan sasaran Renstra Perangkat Daerah merupakan pendorong tercapainya target sasaran RPJMD serta program RPJMD bersumber dari program pada Renstra Perangkat Daerah. Perubahan Renstra Kantor Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Langkat tahun 2019-2024 mencakup :

1. Penyempurnaan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah;
2. Penyempurnaan indikator dan target kinerja.

Renstra Kantor Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Langkat merupakan dokumen perencanaan strategis untuk memberikan arahan kebijakan dan strategi pembangunan sebagai tolak ukur dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang sejalan dengan Visi dan Misi Bupati Langkat.

* 1. **Landasan Hukum**

Peraturan Perundang-Undangan yang mendasari penyusunan Perubahan Renstra Kantor Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Langkat Tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421 );
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Negara Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Langkat di Propinsi Sumatera Utara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4681);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700 );
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 ), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679 );
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573 );
9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982 tentang Pemindahan IbuKota Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai ke Kota Stabat di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 9 );
10. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah II Langkat dan Kabupaten Tingkat II Deli Serdang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 3322 );
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312 );
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025;
14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2019 tentang RPJMD Provinsi Sumatera Utara tahun 2019-2023;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 4 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Kabupaten Langkat;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ( RPJPD ) Kabupaten Langkat Tahun 2005-2025 ( Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 01); dan
17. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 14 Tahun 2015 tentang Tugas dan Fungsi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Langkat.
18. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 07 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2019-2024.
    1. **Maksud dan Tujuan**

Maksud dari penyusunan Perubahan Renstra Kantor Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Langkat tahun 2019-2024 adalah untuk mewujudkan kualitas, integritas dan sinergitas perencanaan penganggaran dengan memberikan landasan penentuan dan kegiatan tahunan sesuai Perubahan RPJMD Kab. Langkat Tahun 2019-2024.

Tujuan dari penyusunan Perubahan Renstra Kantor Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Langkat tahun 2019-2024 adalahsebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan agar lebih efektif dalam mendukung tercapainya visi dan misi Kepala Daerah yang tercantum dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Langkat Tahun 2019-2024.

* 1. **Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan Perubahan Renstra Kantor Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Langkat Tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

* 1. Latar Belakang
  2. Landasan Hukum
  3. Maksud dan Tujuan
  4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

* 1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kantor Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
  2. Sumber Daya Kantor Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
  3. Kinerja Pelayanan Kantor Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Kantor Kantor

Kesatuan Bangsa dan Politik

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah

3.3 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga

3.4 Telaahan Renstra Badan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera

Utara

3.5 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah ( RTRW ) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

3.6 Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kantor Kantor Kesatuan Bangsa dan

Politik

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Arah Kebijakan

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1 Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah

BAB VIII PENUTUP

**BAB II**

**GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Langkat adalah instansi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Langkat berdasarkan Peraturan Bupati Langkat Nomor : 14 Tahun 2015 tentang rincian Tugas dan Fungsi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Langkat. Tugas Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik mengacu kepada Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor : 23 Tahun 2007 tanggal 04 Desember 2007. Tentang Pembentukan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Langkat yang mempunyai Tugas Pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik dan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati.

Dalam melaksanakan tugas rutin Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik bertanggungjawab atas terpeliharanya Persatuan dan Kesatuan Bangsa dengan memberikan pendidikan dan penyuluhan betapa pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan kepada masyarakat luas walaupun terdiri dari multi etnis dan agama serta membangkitkan rasa wawasan / memiliki kebangsaan yang tinggi, cinta tanah air dan wajib membela negara dari ancaman dari dalam maupun dari luar negeri. Dalam hal ini tidak terlepas dari melakukan koordinasi dengan Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, LSM, Ormas, Orsospol, Lembaga Legislatif, Yudikatif maupun Instansi terkait.

Di sektor Sosial Politik sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik di Daerah Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik berperan Memantau, Membuat Pelaporan dan Melakukan Evaluasi terhadap Perkembangan Politik pada sebelum, pada saat dan setelah pelaksanaan Pemilu. Disamping hal tersebut Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik juga memantau keberadaan Parpol di Kabupaten Langkat serta menyiapkan administrasi bantuan bagi Parpol yang mendapatkan kursi di DPRD Langkat.

Susunan Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Langkat.

1. Kepala Kantor

Mempunyai tugas pokok antara lain :

* Melaksanakan kerjasama dengan dinas/instansi terkait dan organisasi lainnya di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, pengkajian / masalah strategis serta hubungan antar lembaga;
* Mengadakan kebijakan pembinaan danpemantauan terhadap kegiatan KesatuanBangsa dan Politik;
* Merumuskan kebijakan pelaksanaanKesatuan Bangsa, pengkajian masalahstrategis, daerah;
* Melaksanakan pembinaan, monitoring,evaluasi dan pengawasan Lembaga/orangasing, ketahanan ideologi dan bela negara,organisasi Profesi dan Yayasan;
* Melaksanakan pembinaan, fasilitasi danpelaksanaan tugas di bidang kewaspadaanNasional, Bina Ideologi, Politik danWawasan Kebangsaan serta Ketahananekonomi, Agama, Seni dan Budaya;
* Merumuskan kebijakan pelaksanaanpembauran bangsa dan kemitraanpengembangan wawasan kebangsaan,hubungan antar lembaga;
* Merumuskan kebijakan dibidangpendidikan politik masyarakat;
* Merumuskan kebijakan pelaksanaanpengamanan masalah aktual danpelaksanaan demokratisasi;
* Merumuskan kebijakan kesiapan terhadappencegahan dini dan penanggulangankorban bencana alam;
* Mengevaluasi dan analisis terhadappermasalahan terkait dengan ketahananekonomi dan sosial yang dapatmengganggu stabilitas daerah danmengancam keutuhan negara kesatuanrepublik indonesia;
* Menyiapkan Renstra, Renja dan LakipKantor Kesatuan Bangsa dan Politik.

1. Kepala Tata Usaha

Mempunyai tugas pokok antara lain :

* Mengkoordinasikan urusan Kepegawaian di lingkungan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
* Menyiapkan urusan administrasi dan kearsipan, mengelola urusan surat menyurat;
* Menyiapkan urusan kerumahtanggaan dilingkungan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
* Menyiapkan bahan pelayanan untuk mengkoordinasikan penyusunan program di Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
* Melakukan evaluasi, pendataan, dan pelaporan kegiatan di Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
* Menghimpun laporan hasil kerja setiap Seksi
* Melaksanakan ketatalaksanaan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
* Menyiapkan bahan – bahan untuk penyusunan rencana keuangan dan anggaran serta analisis pelaksanaan anggaran
* Menghimpun, mengklasifikasi serta mengolah data dan bahan – bahan penyusunan anggaran;
* Menyiapkan usulan pengelola anggaran program dan pembentukan panitia Pengadaan Barang /Jasa
* Melaksanakan urusan keuangan dan penyiapan analisa pelaksanaan anggaran serta menyusun perencanaan pengadaan barang / jasa
* Menyusun dan menyiapkan laporan keuangan;
* Menyiapkan bahan penyusunan Renstra, Renja dan Lakip Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik.

1. Kepala Seksi Wawasan Kebangsaan dan Politik

Mempunyai tugas pokok antara lain :

* Menyusun rencana kegiatan Kesatuan Bangsa dan Politik di bidang Wawasan Kebangsaan dan Politik;
* Menyiapkan data-data pembinaan pembauran menyusun program dan fasilitas serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembauran kebangsaan;
* Menyiapkan dan menyusun program fasilitasi pelaksanaan kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan;
* Memonitoring dan Mengevaluasi Pelaksanaan Kegiatan Lembaga Legislatif dan Organisasi Sosial Politik;
* Menyiapkan, menghimpun dan Fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pendidikan Budaya, Politik Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK);
* Menghimpun mengolah dan mensistematiskan data serta monitoring dan evaluasi yang berhubungan dengan administrasi organisasi kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat;
* Menyiapkan mensistematiskan data dan Fasilitasi serta monitoring dan Evaluasi Pilkada Pemilihan Umum, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden;
* Menyiapkan Renstra dan Lakip Ormas dan LSM;
* Memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan kelembagaan politik pemerintahan;
* Memeriksa dan mempersiapkan berkas Orsospol;
* Melaksanakan dan meningkatkan kesadaran Bela Negara dan cinta tanah air;
* Menyiapkan, menghimpun dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi kelembagaan Partai Politik;
* Melaksanakan tugas - tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor sesuai dengan bidang tugasnya.

1. Kepala Seksi Ketahanan Sosial dam Ekonomi

Mempunyai tugas pokok antara lain :

* Menyusun rencana kegiatan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik di bidang Ketahanan sosial dan Ekonomi;
* Menyiapkan bahan rumusan monitoring dan evaluasi ketahanan ekonomi serta perilaku perekonomian masyarakat;
* Monitoring ketersediaan bahan pangan secara stabil, berkesinambungan dan melakukan operasi pasar dengan instansi terkait;
* Melaksanakan kebijakan bahan rumusan peningkatan pemberdayaan bidang ketahanan sosial, budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan dan penanganan masalah sosial kemasyarakatan;
* Melaksanakan perencanaan, sosialisasi, koordinasi, monitoring dan evaluasi dengan berbagai pihak terkait pelaksanaan Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM);
* Menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait di bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotikadengan instansi terkait;
* Melaksanakan Sosialisasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika serta test urine terhadap masyarakat;
* Memeriksa kelengkapan dokumen permohonan, menerbitkan Rekomendasi Izin Penelitian;
* Mengidentifikasi dan menginventarisasi permasalahan kegiatan program ketahanan sosial dan ekonomi;
* Melaksanakan tugas – tugas lain yang di berikan Kepala Kantor sesuai denganBidang tugasnya.

1. Kepala Seksi Kewaspadaan Nasional

Mempunyai tugas pokok antara lain :

* Menyusun rencana kegiatan KesatuanBangsa dan Politik di bidangKewaspadaan Nasional;
* Menyiapkan, menyusun Program danfasilitasi serta monitoring dan evaluasidalam rangka pembinaan di bidangStabilitas Daerah;
* Menyiapkan, menghimpun, mengolahdata serta monitoring dan evaluasifasilitas kewaspadaan dini dan kerjasamadengan instansi terkait;
* Monitoring dan mengevaluasipelaksanaan serta fasilitasi pelaksanaanPenanganan Gangguan Keamanan DalamNegeri dan penanganan konflik sosial;
* Menyiapkan, menyusun program danfasilitasi serta monitoring dan evaluasipelaksanaan kerukunan agama dankepercayaan;
* Menghimpun, memonitoring danmengevaluasi keberadaan orang asing danlembaga asing;
* Meneliti berkas dalam rangka membantukelancaran administrasi;
* Melaksanakan tugas, memberikanpengarahan dan pembinaan kepada staf diseksi kewaspadaan nasional;
* Menyiapkan, menghimpun, mengolah,serta monitoring dan evaluasi fasilitasipencegahan terorisme;
* Melaksanakan tugas-tugas yang diberikanKepala Kantor sesuai dengan bidangtugasnya.

**KEPALA KANTOR**

**Kepala Seksi Ketahanan Sosial dam Ekonomi**

**Kepala Seksi Kewaspadaan Nasional**

**Kepala Seksi Wawasan Kebangsaan dan Politik**

**KEPALA TATA USAHA**

2.2 Tata Laksana Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Langkat

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Langkat mempunyai tugas membantu Bupati Langkat sebagai unsur penunjang urusan pemerintahan lingkup Kesatuan Bangsa dan Politik dengan memberikan sejumlah layanan baik layanan yang bersifat Internal maupun yang bersifat Eksternal berikut layanan yang dilaksanakan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Langkat :

1. Pelayanan Internal

Untuk mengatur dan mengelolah unsur-unsur yang bersifat Internal dengan tahapan dan mekanisme baku, untuk itu Pelayanan Internal Kantor Kesatuan Bahgsa dan Politik Kabupaten antara lain :

1. Penyusunan Program dan Kegiatan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik KabupatenLangkat;
2. Pelaksanaan Inventarisasi, Pengolahan, Penyajian dan Pemeliharaan data Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik kabupaten Langkat;
3. Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Program Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;
4. Menyusun Laporan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;
5. Penyusunan Perbendaharaan Keuangan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;
6. Pelaksanaan Akuntansi Keuangan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;
7. Pelaksanaan Verifikasi Anggaran Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;
8. Penyusunan Pertanggungjawaban Anggaran Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;
9. Pengelolaan Kearsipan;
10. Penyelenggaraan Kerumahtanggaan dan Protokol Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;
11. Pengelolaan Data Kepegawaian Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;
12. Penyiapan Bahan Pembinaan Pegawai Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;
13. Pelaksanaan Koordinasi Antar Daerah.
14. Pelayanan Eksternal

Untuk mengatur dan mengelolah unsur-unsur yang bersifat Eksternal dengan tahapan dan mekanisme baku, untuk itu Pelayanan Eksternal Kantor Kesatuan Bahgsa dan Politik Kabupaten antara lain :

1. Fasilitasi Forum Pembauran Kebangsaan ( FPK );
2. Fasilitasi Tim Verifikasi Bantuan Keuangan Partai Politik;
3. Fasilitasi Tim Terpadu Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika;
4. Fasilitasi Tim Terpadu Pembinaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan;
5. Fasilitasi Tim Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat ( FKDM );
6. Fasilitasi Tim Penanganan Konflik Sosial;
7. Pemberian Rekomendasi Surat Keterangan Terdaftar ( SKT ) Kepada Organisasi Kemasyarakatan;
8. Fasilitasi Sosial Pendidikan Wawasan Kebangsaan, Pembauran, Bela Negara, Gerakan Revolusi Mental, Kebhinnekaan, Harmonisasi antar Inter Agama, Dialog Budaya dalam Rangka Kerukunan Antar Etnis, Dialog Pencegahan Berkembangnya Penyakit Masyarakat, Dialog Terpadu tentang Kenakalan Remaja, Kewaspadaan Dini Masyarakat, Penangganan Konflik;
9. Fasilitasi Pembinaan Laporan Pertanggungjawaban Partai Politik;
10. Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan dan artai Politik.

2.3 Sumber Daya Perangkat Daerah

Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Langkat Per Januari 2019 adalah sebanyak 18 Orang yang terdiri dari 13 Laki-laki dan 5 perempuan. Kondisi Pegawai Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Langkat:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Nama Jabatan** | **Golongan** | **Ket** |
| 1 | Kepala Kantor | IV/b | 1 Orang |
| 2 | Kepala Tata Usaha | III/b | 1 Orang |
| 3 | Kepala Seksi Wawasan Kebangsaan dan Politik | III/d | 1 Orang |
| 4 | Kepala Seksi Ketahanan Sosial dam Ekonomi | III/d | 1 Orang |
| 5 | Kepala Seksi Kewaspadaan Nasional | III/d | 1 Orang |
| 6 | Staf | IV/a | 2 Orang |
| 7 | Staf | III/b | 1 Orang |
| 8 | Staf | III/a | 4 Orang |
| 9 | Staf | II/d | 1 Orang |
| 10 | Staf | II/c | 2 Orang |
| 11 | Staf | II/b | 2 Orang |

Tabel 2.1

Jumlah PNS Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Langkat Tahun 2021.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No | Uraian | Jumlah ( Orang ) PNS |
| 1 | Jumlah SDM Per 30 Desember 2021 | 16 |
| 2 | Mutasi selama Tahun 2021: | - |
|  | Pensiun | - |
|  | Mutasi ( Masuk ) | 1 |
|  | Mutasi ( Keluar ) | 0 |
|  | Meninggal | 2 |
| 3 | Jumlah SDM Per 30 Desember 2021 | 16 |

Komposisi SDM berdasarkan jenjang jabatan ( Peran ), Strata Pendidikan dan Golongan SDM menunjukan keadaan sebagai berikut :

Tabel 2.2

Komposisi PNS Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Langkat berdasarkan jenjang pendidikan :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No | Uraian | Jumlah Jenjang Jabatan ( Orang ) |
| 1 | Eselon II | - |
|  | Eselon III | 1 Orang |
|  | Eselon IV | 3 Orang |
| 2 | Pejabat Fungsional | - |
| 3 | Pelaksana | - |
| Jumlah | | 5 Orang |

Tabel 2.3

Jumlah PNS Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Langkat berdasarkan jenjang pendidikan.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No | Uraian | Jumlah ( Orang ) |
| 1 | Strata III | - |
| 2 | Strata II | 1 Orang |
| 3 | Strata I | 10 Orang |
| 4 | Diploma III | 1 Orang |
| 5 | SLTA | 4 Orang |
| 6 | SLTP | - |
|  | | 163Orang |

Tabel 2.4

Jumlah PNS Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Langkat Berdasarkan Golongan:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No | Uraian | Jumlah ( Orang ) |
| 1 | Golongan IV/c | - |
| 2 | Golongan IV/b | - |
| 3 | Golongan IV/a | 2 |
| 4 | Golongan III/d | 3 |
| 5 | Golongan III/c | 2 |
| 6 | Golongan III/b | 4 |
| 7 | Golongan III/a | 1 |
| 8 | Golongan II/d | 1 |
| 9 | Golongan II/c | 2 |
| 10 | Golongan II/b | 1 |
| 11 | Golongan II/a | - |
| Jumlah | | 16 Orang |

Tabel 2.5

Nama PNS Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Langkat berdasarkan Jabatan Struktural dan Fungsional :

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Jabatan/Strutural | Nama Pejabat | Eselon | Golongan | Nomor Induk Pegawai |
| 1 | Kepala Kantor | FAISAL BADAWI. S.Sos | III | Pembina, IV/a | 19730518 200604 1 003 |
| 2 | Kepala Tata Usaha | MARHAPOSAN SINAGA, SE | IV | Penata, III/c | 19851217 200801 1 003 |
| 3 | Kepala Seksi Wawasan Kebangsaan dan Politik | AINAL NURUL HIJJAH NURDIN, SH | IV | Penata Tingkat I, III/d | 19710105 199803 2 005 |
| 4 | Kepala Seksi Ketahanan Sosial dam Ekonomi | Dra. SRI ANTARITA BARUS | IV | Penata Tingkat I, III/d | 19661020 199303 2 004 |
| 5 | Kepala Seksi Kewaspadaan Nasional |  |  |  |  |

2.5 Sarana dan Prasarana Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Langkat

Sarana dan Prasarana untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Langkat adalah sebagai berikut :

1. Bangunan Kantor.

Bangunan Gedung Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Langkat terdiri dari ruang kerja PNS sebanyak 11 Ruang terdiri dari Ruang Staf dan Aula. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik kabupaten Langkat Beralaman di Jalan Imam Bonjol No 59 Stabat.

1. Kenderaan Dinas

Kenderaan Dinas terdiri dari Roda Empat sebanyak 3 ( Tiga ) Unit dan Roda 2 ( Dua ) sebanyak 8 Unit.

1. Fasilitas

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No | Nama Barang | Jumlah |
| 1 | Mesin Ketik Manual | 1 Unit |
| 2 | Lemari Kayu | 11 Unit |
| 3 | Rak Kayu | 3 Unit |
| 4 | Filing Cabinet Besi | 4 Unit |
| 5 | Brankas | 1 Unit |
| 6 | Lemari Kaca | 1 Unit |
| 7 | White Board | 3 Unit |
| 8 | Mesin Absen | 1 Unit |
| 9 | Papan Pengumuman | 2 Unit |
| 10 | Papan Tulis | 1 Unit |
| 11 | Perkakas Kantor | 3 Unit |
| 12 | Meja Kerja Kayu | 2 Unit |
| 13 | Kursi Kayu | 3 Unit |
| 14 | Meja Rapat | 2 Unit |
| 15 | Meja ½ Brio | 1 Unit |
| 16 | Kursi Fiber Glas/Plastik | 5 Unit |
| 17 | Kursi Rapat | 2 Unit |
| 18 | Kursi Tamu | 2 Unit |
| 19 | Kursi Putar | 5 Unit |
| 20 | Meja Komputer | 3 Unit |
| 21 | Meja Tulis | 2 Unit |
| 22 | Jam Mekanis | 3 Unit |
| 23 | Lemari Es | 1 Unit |
| 24 | AC | 10 Unit |
| 25 | Kipas Angin | 3 Unit |
| 26 | Televisi | 1 Unit |
| 27 | Louspeaker | 1 Unit |
| 28 | Stabilisator | 1 Unit |
| 29 | Dispenser | 5 Unit |
| 30 | Gordyin | 2 Unit |
| 31 | Meja Kerja Pejabat | 2 Unit |
| 32 | Meja Tamu Biasa | 1 Unit |
| 33 | Meja Rapat Pejabat | 2 Unit |
| 34 | Kursi Kerja Pejabat | 1 Unit |
| 35 | Camera Electronic | 2 Unit |
| 36 | Projector | 1 Unit |
| 37 | Printer | 10 Unit |
| 38 | Sound Sistem | 1 Unit |
| 39 | Telex | 1 Unit |
| 40 | Facsimile | 1 Unit |
| 41 | Genset | 1 Unit |
| 42 | Mini Komputer | 1 Unit |
| 43 | Pc Unit | 6 Unit |
| 44 | Laptop | 9 Unit |
| 45 | CPU | 2 Unit |
| 46 | Monitor | 2 Unit |

2.6 Kinerja Pelayanan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Langkat

Kondisi umum Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Langkat sesuai dengan tugas pokok Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik yang diberi emban oleh Bupati Langkat berdasarkan peraturan Bupati Langkat Nomor : 14 Tahun 2015 tentang rincian Tugas dan Fungsi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Langkat. Tugas Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik mengacu kepada Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor : 23 Tahun 2007 tanggal 04 Desember 2007. Tentang Pembentukan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Langkat yang mempunyai Tugas Pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik dan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati.

2.7 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Langkat.

Kinerja pelayanan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik kabupaten Langkat menunjukkan tingkat capaian kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditentukan, yang mana tercantum dalam dokumen Perubahan RPJMD Kabupaten Langkat Tahun 2019-2024.

Tingkat ketercapaian kinerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Langkat berdasarkan hasil pengukuran terhadap indikator kinerja sasaran stategis yang tercantum dalam dokumen Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Langkat. Kinerja pelayanan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik disajikan tabel dengan format sebagi berikut.

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran jangka menengah Pelayanan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Langkat Tahun 2020 - 2024

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR SASARAN | | DATA KONDISI AWAL | TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE- | | | |
| INDIKATOR | SATUAN | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| 1 | Tercipatanya Masyarakat yang Mandiri | Meningkatnya Status Kemandirian Desa | Cakupan Oganisasi Masyarakat yang Mendapatkan Pembinaan | % | n/a | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Terciptanya reformasi birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan pemanfaatan sistem informasi dan teknologi | Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja keuangan pemerintah | Nilai Evaluasi AKIP | Nilai (AA, A, B, CC, C, D) | CC | B | BB | BB | BB |

Tabel 2.7 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Program dan Kegiatan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Langkat Tahun 2020 – 2021

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tujuan | Sasaran | Kode | | | | | Program dan Kegiatan | Anggaran Pada Tahun Ke- | | Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke - | | Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke - | | Rata-Rata Pertumbuhan | |
| 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | | | | | 4 | 8 | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8 |  |  |  |  | Unsur Pemerintah Umum | 3.692.958.470 |  | 3.235.427.289 |  |  |  |  |  |
| Terciptanya Masyarakat yang Mandiri | Meningkatkan Status Kemandirian Desa | 8 | 01 |  |  |  | Kesatuan Bangsa dan Politik | 3.692.958.470 | 0 | 3.235.427.289 | 0 | 87,61 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 01 | 01 |  |  | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 2.527.192.671 | 0 | 2.100.919.443 | 0 | 83,13 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 01 | **01** | **202** |  | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | 1.935.526.253 | 0 | 1.551.125.877 | 0 | 80,14 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 01 | 01 | 202 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 1.880.693.000 | 0 | 1.496.605.877 | 0 | 79,58 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 01 | 01 | 202 | 02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 54.833.253 | 0 | 54.520.000 | 0 | 99,43 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 01 | 01 | 202 | 05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 01 | 01 | 202 | 06 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 01 | 01 | 202 | 07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 01 | **01** | **205** |  | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | 36.175.000 | 0 | 36.175.000 | 0 | 100,00 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 01 | 01 | 205 | 02 | Pengadaan Pakaian Dinas Harian ( PDH ) | 36.175.000 | 0 | 36.175.000 | 0 | 100,00 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 01 | 01 | 205 | 09 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | 0 | 0 | - | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 01 | **01** | **206** |  | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | 254.795.718 | 0 | 254.247.150 | 0 | 99,78 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 01 | 01 | 206 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 5.915.900 | 0 | 5.908.000 | 0 | 99,87 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 01 | 01 | 206 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 17.129.375 | 0 | 17.079.750 | 0 | 99,71 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 01 | 01 | 206 | 03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 7.943.358 | 0 | 7.900.000 | 0 | 99,45 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 01 | 01 | 206 | 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 43.494.000 | 0 | 43.490.000 | 0 | 99,99 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 01 | 01 | 206 | 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 18.058.200 | 0 | 17.987.600 | 0 | 99,61 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 01 | 01 | 206 | 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 18.000.000 | 0 | 18.000.000 | 0 | 100,00 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 01 | 01 | 206 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 144.254.885 | 0 | 143.881.800 | 0 | 99,74 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 01 | **01** | **207** |  | **Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | 29.850.000 | 0 | 29.450.000 | 0 | 98,66 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 01 | 01 | 207 | 05 | Pengadaan Mebel | 10.000.000 | 0 | 9.600.000 | 0 | 96,00 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 01 | 01 | 207 | 06 | Pengadan Peralatan dan Mesin Lainnya | 19.850.000 | 0 | 19.850.000 | 0 | 100,00 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 01 | **01** | **208** |  | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | 125.208.800 | 0 | 104.754.676 | 0 | 83,66 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 01 | 01 | 208 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber daya Air dan Listrik | 62.068.800 | 0 | 49.334.676 | 0 | 79,48 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 01 | 01 | 208 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 63.140.000 | 0 | 55.420.000 | 0 | 87,77 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 01 | **01** | **209** |  | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | 145.636.900 | 0 | 125.166.740 | 0 | 85,94 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 01 | 01 | 209 | 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 3.200.000 | 0 | 1.986.190 | 0 | 62,07 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 01 | 01 | 209 | 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 136.436.900 | 0 | 117.200.550 | 0 | 85,90 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 01 | 01 | 209 | 03 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 6.000.000 | 0 | 5.980.000 | 0 | 99,67 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 01 | 01 | 209 | 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | - | 0 | - | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 01 | **02** |  |  | **Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan** | 182.705.779 | 0 | 174.302.400 | 0 | 95,40 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 01 | 02 | 2.01 |  | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan | 182.705.779 | 0 | 174.302.400 | 0 | 95,40 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 01 | 02 | 2.01 | 01 | Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | 174.678.779 | 0 | 172.525.400 | 0 | 98,77 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 01 | 02 | 2.01 | 04 | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | 8.027.000 | 0 | 1.777.000 | 0 | 22,14 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 01 | **03** |  |  | **Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik** | 50.163.700 | 0 | 50.163.700 | 0 | 100,00 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 01 | 03 | 2.01 |  | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik. | 50.163.700 | 0 | 50.163.700 | 0 | 100,00 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 01 | 03 | 2.01 | 03 | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | 50.163.700 | 0 | 50.163.700 | 0 | 100,00 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 01 | **04** |  |  | **Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan** | 39.865.600 | 0 | 37.295.600 | 0 | 93,55 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 01 | 04 | 2.01 | 01 | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan | 39.865.600 | 0 | 37.295.600 | 0 | 93,55 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 01 |  |  |  | Penyusunan Program Kerja dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | 39.865.600 | 0 | 37.295.600 | 0 | 93,55 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 01 | **05** |  |  | **Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya** | 315.236.250 | 0 | 310.699.250 | 0 | 98,56 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 01 | 05 | 2.01 |  | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya | 315.236.250 | 0 | 310.699.250 | 0 | 98,56 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 01 | 05 | 2.01 | 01 | Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | 178.987.000 | 0 | 176.948.000 | 0 | 98,86 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 01 | 05 | 2.01 | 03 | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | - | 0 | - | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 01 | 05 | 2.01 | 4 | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | 16.989.500 | 0 | 15.989.500 | 0 | 94,11 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 01 | 05 | 2.01 | 5 | Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | 119.259.750 | 0 | 117.761.750 | 0 | 98,74 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 01 |  |  |  | **Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial** | 577.794.470 | 0 | 562.046.896 | 0 | 97,27 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 01 | **06** |  |  | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penaganan Konflik Sosial | 577.794.470 | 0 | 562.046.896 | 0 | 97,27 | 0 | 0 | 0 |
| X | XX | 06 | 2.01 | 01 | Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, Serta Penaganan Konflik di Daerah | 268.206.400 | 0 | 260.401.300 | 0 | 97,09 | 0 | 0 | 0 |
| X | XX | 06 | 2.01 | 04 | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, Serta Penanganan Konflik DI Daerah | 154.794.035 | 0 | 150.822.798 | 0 | 97,43 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | X | XX | 06 | 2.01 | 05 | Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, Serta Penanganan Konflik di Daerah | 154.794.035 | 0 | 150.822.798 |  | 97,43 |  |  |  |

2.8 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kantor Kesbangpol

Kesbangpol dalam menjalankan tugas dan funsginya tentunya tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi baik internal maupun eksternal. Namun demikian, permasalahan-permasalahan yang dihadapi tersebut harus dipandangn sebagai suatu tantangan dan peluang dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan pelayanan pada Kantor Kesbangpol Kab. Langkat.

Untuk menghadapi tantangan dan memenuhi harapan masyarakat, diperlukan perencanaan yang berkualitas, sinergis dan kredibel. Sebagai upaya mendorong Kantor Kesbangpol menjadi Lembaga yang mampu menjalankan peran dan tupoksinya ditengah berjalannya Resntra Kantor Kesbangpol Kabupaten Langkat tahun 2019-2024 ditemukan kendalam dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Hal tersebut dipengaruhi oleh adanya perubahan kebijakan nasional berubahan nomenklatur, klasifikasi dan kodefikasi perencanaan pembangunna dan keuangan daerah dan terjadinya bencana non-alam yaitu pandemi covid-19 di Indonesia. Adapun masing-masing kondisi lingkungan internal dan ekternal antara lain diuraikan sebagai berikut :

Tabel 2.8 Analisis SWOT

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| INTERNAL | **Kekuatan (strength)** | **Kelemahan (weakness)** |
| * Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) secara kuantitas yang memadai; * Tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung pekerjaan; * Adanya dukungan dana untuk membantu kegiatan yang berasal dari APBD; | * Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) pada Kantor Kesbangpol; * Secara keseluruhan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Kantor Kesbangpol masih belum memenuhi standar dan secara kuantitas jumlah PNS yang memenuhi syarat masih belum mencukupi dan perlunya peningkatan kualitas; * Terbatasnya penyediaan anggaran untuk melaksanakan program dan kegiatan secara berkesinambungan; * Minimnya sarana dan prasarana dalam rangka menunjang kinerja aparatur Kantor Kesbangpol Kabupaten Langkat. |
| EKSTERNAL | **Peluang (opportunities)** | **Ancaman (threats)** |
| * Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menggunakan hak berorganisasi dan berpolitik melalui Organisasi Kemasyarakatan (Ormas), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Yayasan maupun Partai Politik; * Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk menjaga toleransi dan kerukunan. | * Kondisi masyarakat yang masih rawan terhadap konflik; * Masih adanya krisis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah; * Kurangnya daya tangkal masyarakat dan aparat terhadap penetrasi asing; * Kurangnya kesadaran masyarakat akan bahaya radikalisme dan terorisme. |

**BAB III**

**PERMASALAHAN DAN ISU**

**STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

**3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasakan Tugas dan Fungsi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik**

**Kabupaten Langkat**

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Langkat tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi. Di bawah ini akan diuraikan permasalahan yang dihadapi pada setiap tujuan/sasaran yang ingin dicapai berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan melalui program dan kegiatan.

3.1.1 Bidang Idiologi.

Tingkat kemajuan Tehnologi Informatika yang mampu diakses seluruh pelosok dinegeri ini tentu akan mepengaruhi struktur dan pola kehidupan masyarakat. Disisi lain pengaruh Globalisasi mengakibatkan negara-negara di dunia ini tiada batas. Kondisi idiologi bangsa asing tentu akan mempengaruhi sekaligus mengganggu idiologi bangsa kita khususnya bagi mereka yang masih memiliki kemampuan yang masih terbatas dan ketetapan idiologi Pancasilanya masih goyah, sehingga wawasan kebangsaan semakin meluntur. Atau perubahan paradigma masyarakat mengadopsi HAM liberal melupakan HAM menurut pancasila yang sebenarnya cukup berbeda kedua faham HAM tersebut.

Pengaruh Globalisasi tentu akan mempengaruhi pola kehidupan masyarakat kita, pola-pola hidup sudah merambah ke pola liberal. Perubahan pola tersebut akan membuat hidup ini cukup keras sehingga akan merombak tatanan kesalehan sosial masyarakat yang dahulunya santun, lemah lembut penuh pola hidup kekeluargaan dan gotong royong akan berubah menjadi individual danmaterialistik. Kondisi ini berakibat pada sering muncul isue SARA, terjadinya konflik baik horizontal maupun vertikal.

3.1.2 Bidang Politik.

Ketika pada era Orde Baru demokrasi kita pada demokrasi yang otoritarian, setelah memasuki era reformasi lebih bercirikan demokrasi politik yang lebih menekankan pada demokratisasi dengan penekanan pada otonomi daerah yang lebih luas.Disektor Pemerintahan telah terwujud demokratisasi dengan penekanan otonomi daerah, namun sector politik masih saja sentralistik. Implikasi pada politic cost di Indonesia cukup mahal, pragmatisme politik cukup menonjol dan yang lebih ironis lagi demokrasi kita tergadaikan dengan gejala ”...... memilih siapa mendapat apa....”. Kondisi ini terjadi karena masyarakat tidak mampu mengimbangi perkembangan perpolitikan atau tingkat pendidikan politik masyarakat belum memadai.

3.1.3 Bidang Ekonomi Sosial, Budaya dan Agama

Adanya konflik antar atau inter umat beragama seperti pendirian tempat ibadah dan aliran yang menyimpang.

3.1.4 Bidang Keamanan dan Ketertiban.

Berpijak pada ketiga gejala diatas tentunya akan mempengaruhi situasi dan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat, ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan (ATHG) terhadap kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara yang berkaitan dengan ideologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya (Ipoleksosbud) akan semakin naik baik kuantitas dan kualitasnya.

Tabel 3.1 PemetaanPermasalahanuntukPenentuanPrioritas dan Sasaran

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **MasalahPokok** | **Masalah** | **AkarMasalah** |
| 1. | Kurangnyapemahamanmasyarakattentangpolitik yang baik, kondisikemanan dan ketentraman yang kondusifsertakewaspadaandini di daerah. | * Kurangnyakualitaspemahaman dan pelaksanaanpahamkebangsaandalamkeanekaragamanbudaya, suku, ras dan agama; * Kurangnyapemahaman, kesadaran dan partisipasimasyarakattentangpolitik; * Perlunyapenguatanperanpemerintahdaerahdalammeningkatkankewaspadaandaerahdeteksidini dan cegahdinikonfliksosial | * Kurangnyakesadaranwawasankebangsaan; * Kurangnyakualitas Pendidikan politikmasyarakat; * Belum adanyasistempelaporanintelejenterpadumelaluiteknologiinformasi; * Kurang maksimalnyarencanaaksiterpadupencegahan dan penanganankonfliksosial. |
| 2. | Keterbatasanpemenuhankebutuhanpenunjangkinerjaperangkatdaerah. | Minimnyapemenuhansumberdayauntukmenunjangkinerjaperangkatdaerah. | * Keahlian dan keterampilanbagi SDM Kantor Kesbangpolbelumterpenuhi; * Keterbatasananggaranuntukpeningkatansarana dan prasana yang mendukungpekerjaan. |
| 3. | SumberDayaManusia | Kurang pedulinyaaparaturterhadaptugas dan fungsi OPD Kantor Kesbangpol | Adanyaanggapandiskriminasiantaraparatur |
| 4. | Sarana dan Prasarana | Sarana dan Prasaranapendukungpenyelenggaraanpelayananbelummaksimal | Masih adanyabeberapasarana yang belumtersedia yang menghambatkinerjaaparatur |

**3.2 Telaah Visi Misi Perubahan RPJMD Kabupaten Langkat 2019 – 2024**

Visi Kabupaten Langkat 2019 – 2024 menggambarkan tujuan utama penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Langkat yang dapat terwujud melalui upaya pemerintahan bersama DPRD, Masyarakat dan Pemangku Kepentingan lainnya, yaitu :

“ MENJADIKAN LANGKAT YANG MAJU, SEJAHTERA DAN RELIGIUS MELALUI PENGEMBANGAN PARIWISATA DAN INSTRASTRUKTUR YANG BERKELANJUTAN “.

Visi tersebut mengandung tiga elemen penting dalam capaian pembangunan Kabupaten Langkat periode 2019 – 2024 yakni Sejahtera, Masyarakat Religius dan Pembangunan Berwawasan Lingkungan. Dari ketiga elemen tersebut dapat disimpulkan telaah bahwa Kepala Daerah ingin membangun Kabupaten Langkat menjadi masyarakat maju dengan tetap mempertahankan kesejahteraan, moral religiusitas dan pembangunan berkelanjutan.

Untuk mewujudkan visi tersebut, ditetapkan 5 Misi Bupati Langkat untuk dilaksanakandalam periode 5 tahun yang akan datang, sebagai berikut :

1. Mewujudkan Pemberdayaan Masyarakat Untuk Meningkatkan Kesejahteraan dan Pengentasan Permasalahan Sosial.
2. Meningkatkan Pelayanan Kebutuhan Dasar Untuk Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia.
3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Dengan Prioritas Pengembangan Pada Sektor Pariwisata.
4. Meningkatkan Kinerja Infrastruktur dan Tata Ruang Berkelanjutan.
5. Menciptakan Reformasi Birokrasi dalam Mendukung Penyelenggaraan Sistem Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih.

Dikaitkan dengan visi dan misi Perubahan RPJMD Kabupaten Langkat Tahun 2019 – 2024 serta sebagai unsur penunjang Urusan Pemerintahan pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik kabupaten Langkat bersinegis dengan Misi Bupati Langkat Ke- 1 yaitu : “Mewujudkan Pemberdayaan Masyarakat Untuk Meningkatkan Kesejahteraan dan Pengentasan Permasalahan Sosial “.

Dari misi ini dapat di simpulkan perwujudan pemberdayaan masyarakat untuk peningkatan kesejahteraan bertujuan untuk menjadi masyarakat dan desa sebagai sektor utama dalam menurunkan kemiskinan. Tujuan utama misi ini ialah menurunkan tingkat kemiskinan dan meningkatkan kemandirian desa. Misi ini dapat dicapai dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dan kemandirian desa untuk peningkatan kesejahteraan dan pengentasan permasalahan sosial. Upaya-upaya yang dilakukan dalam misi ini ialah meliputi peningkatan status kemandirian desa, peningkatan kesehajteraan sosial masyarakat, serta peningkatan kapasitas pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan. Unsur pemerintahan daerah yang sangat terkait dengan misi ini ialah pemberdayaan masyarakat dan desa, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, ketentraman, ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat dan kewilayahan.

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Langkat sebagai perangkat daerah yang menunjang fungsi pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik bersinegis dengan Misi Bupati Langkat pada yaitu pada Misi Ke-Iyaitu :

“ Mewujudkan Pemberdayaan Masyarakat Untuk Meningkatkan Kesejahteraan dan Pengentasan Permasalahan Sosial “.

Tujuan :

“Terciptanya Masyarakat Yang Mandiri “.

Sasaran :

“ Meningkatnya Status Kemandirian Desa “.

**Strategi**

**1. Peningkatan Pencegahan, Penanganan Dan Pemulihan Pasca Konflik**

Dengan arah kebijadan tiap tahun dalam lima tahuan untuk mewujudkan Visidan Misi Bupati Langkat yaitu :

a. Menyusun Regulasi dalam pencegahan konflik, penghentian konflik danPemulihan Pasca Konflik

b. Peningkatan Kewaspadaan Dini Masyarakat, Tokoh Agama, Pemuda,Pelajar Dan Masyarakat

c. Pengamanan Terpadu Pemerintah Kabupaten Langkat, TNI, POLRI,Kejaksaan Dan Masyarakat

d. Rekonsiliasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pasca Konflik

e. Peningkatan, Penguatan Dan Pemanfaatan Fungsi Tim FasilitasiKewaspadaan Daerah

**2. Meningkatkan Pemahaman Politik Terhadap Elemen Masyarakat**

Dengan arah kebijadan tiap tahun dalam lima tahuan untuk mewujudkan Visidan Misi Bupati Langkat yaitu :

a. Penyusunan Regulasi Pendidikan Politik

b. Meningkatkan Pemahaman Politik

c. Meningkatkan Kerjasama Dengan Lembaga terkait

**3. Meningkatnya Pemahaman Wawasan Kebangsaan Terhadap ElemenMasyarakat**

Dengan arah kebijadan tiap tahun dalam lima tahuan untuk mewujudkan Visidan Misi Bupati Langkat yaitu :

a. Penyusunan Regulasi Pemahamanan Wawasan Kebangsaan

b. Meningkatkan Pemahaman Wawasan Kebangsaan

c. Meningkatkan Kerjasama Dengan Lembaga TerkaitDalam mencapai misi tersebut Pemerintah Kabupaten Langkat melalui KantorKesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Langkat menyelenggarakanbeberapa program dan kegiatan sebagai berikut :

1. Sosialisasi, Seminar, semiloka, workshop tentang Wawasan Kebangsaan dalamupaya meningkatkan Nasionalisme dan sebagai penangkal pengaruh globalisasi,ekonomi dunia dan jaringan tehnologi informatika.

2. Meminimalisir konflik SARA baik secara horizontal-vertikal.

3. Mewujudkan kerukunan umat beragama melalui program-program berkerjasamadengan FKUB, TOGA, TOMAS dan TODA.

4. Pendidikan Politik bagi Kader-kader Parpol yang diselenggarakan oleh PemkabLangkat melalui Sosialisasi pemilu ketika akan dilaksanakan pemilu (Pileg,Pilpres, dan Pemilukada).

5. Kader politik mampu meningkatkan pendidikan politik bagi konstituennya.Mereka yg sudah duduk di Legislatif lebih responsif dan reaktif.

6. Kapasitas aparat Kesbangpol mampu membaca perkembangan situasikhususnya cegah dan tangkal dini potensi ATHG

7. Dengan tetap menjunjung tinggi upaya kepatuhan hukum di tengah – tengahmasyarakat sehingga keamanan dan ketertiban dapat terlaksana serta dalammenciptakan Rasa Aman bagi seluruh Masyarakat.

* 1. **Telaahan Renstra K/L (Kementerian/Lembaga) dan Renstra Propinsi**

Visi Kementerian Dalam Negeri **“Mampu menjadi Poros JalannyaPemerintahan dan Politik Dalam Negeri, Meningkatkan Pelayanan Publik,Menegakkan Demokrasi dan Menjaga Integrasi Bangsa”**

Dengan Misi :

1. Memantapkan Ideologi dan Wawasan Kebangsaan dengan memperkuatpengamalan terhadap Pancasila, UUD 1945, Kebhinekaan, menegakkanpersatuan dan kesatuan, demokratisasi, serta membangun karakter bangsa danstabilitas dalam negeri
2. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umummelalui harmonisasi hubungan pusat-daerah, menciptakan ketentraman, danketertiban umum, serta meningkatkan pendayagunaan administrasikependudukan
3. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerahmelalui peningkatan kapasitas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahanserta didukung pengelolaan anggaran dan keungan yang akuntabel dan berpihakkepada rakyat
4. Mendorong terwujudnya keserasihan dan keadilan pembangunan antar wilayahdan daerah melalui pembangunan dari pinggiran dengan memperkuan daerahdan desa serta perbatasan
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan efektif dengandidukung aparatur yang berkompeten dan pengawasan yang efektif dalamrangka pemantapan pelayanan public.

Dalam mendukung misi pertama yaitu : Memantapkan Ideologi dan WawasanKebangsaan dengan memperkuat pengamalan terhadap Pancasila, UUD 1945,Kebhinekaan, menegakkan persatuan dan kesatuan, demokratisasi, sertamembangun karakter bangsa dan stabilitas dalam negeri dan tujuan strategis :Kokohnya persatuan dan kesatuan serta karakter bangsa melalui pengamalan

nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, dan kebhinekaan sebagai tatanan dan perilakuhidup berbangsa dan bernegara dengan sasaran strategis :

1. Terpeliharanya persatuan dan kesatuan bangsa
2. Terpeliharanya stabilitas politik dalam negeri dalam rangka mewujudkandemokrasi yang berkualitas.

**BAB IV**

**TUJUAN DAN SASARAN**

Dalam rangka mewujudkan Visi dan menjalankan Misi Bupati dan Wakil Bupati Langkat Tahun 2019 – 2024 yang terdapat di Perubahan RPJMD Kabupaten Langkat Tahun 2019 – 2024, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Langkat menetapkan tujuan dan sasaran pada perubahan Renstra Tahun 2019 – 2024. Tujun ini ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati, serta didasarkan pada isu=isu strategis. Tujuan ini dirumuskan untuk memberikan arah dalam setiap penyusunan perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Langkat.

Sedangkan sasaran merupakan output yang akan dicapai secara nyata, spesifik, terukur dalam kurun waktu yang telah lebih pendek dari tujuan, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan. Tujuan jangka menengah yang akan di capai Oleh Kator Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Langkat dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2019 – 2024 adalah ***“ Mewujudkan Pemberdayaan Masyarakat Untuk Peningkatan Kesejahteraan dan Pengentasan Permasalahan Sosial “.***

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Langkat menetapkan tujuan strategik berdasarkan visi, misi dan faktor – faktor kunci keberhasilan. Sasaran – sasaran strategik Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Langkat merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategik organisasi dirumuskan untuk masing – masing tujuan yang telah ditetapkan.

Tujuan dan sasaran strategik yang ditetapkan dapat diuraikan sebagai berikut:

Tujuan Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Langkat tahun 2019-2024 adalah ***“*** Terciptanya Masyarakat Yang Mandiri “ melalui Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatandengan indikator tujuannya adalah :

* Cakupan Organisasi Masyarakat yang mendapatkan pembinaan.
* Meningkatnya Partisipasi dan keberdayaan Masyarakat
* Memberikan Pelayanan Kepada Masyarakat
* Menjaga, Memelihara dan Memperkuat Persatuan Bangsa dan Kesatuan Bangsa

Adapun sasaran dari tujuan tersebut adalah :

* Meningkatkan Status Kemandirian Desa.
* Meningkatkan Aspirasi Masyarakat
* Melakukan Pembinaan dan Pengembangan untuk mewujudkan tujuan organisasi

Tabel 2.6 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Langkat Tahun 2020 - 2024

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Indikator Kinerja | Target NSPK | Target IKK | Target Indikator Lainnya | Target Renstra Tahun Ke | | | Realisasi Capaian Renstra Tahun Ke | | | Rasio Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke | | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2019 | 2020 | 2021 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Cakupan Organisasi Masyarakat yang mendapatkan pembinaan |  | Persen % |  | n/a | 100 | 100 | n/a | 100 | 0 | n/a | 54 | 0 |

**BAB V**

**STRATGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

**5. 1 Strategi yang diterapkan untuk mencapai tujuan adalah :**

1. Meningkatkan pemanfaatan wadah-wadah aktualisasi keagamaan.

Dalam hal meningkatkan wadah-wadah aktualisasi keagamaan ini peran FKUB Kabupaten Langkat yang mana Forum ini yang menyatukan antara umat beragama yang ada di Kabupaten Langkat.

1. Meningkatkan rasa solidaritas masyarakat dalam pemliharaan ketentraman dan ketertiban Lingkungan. Dalam hal ini peran sekhoder-sekhoder antara FKDM, FPK, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, LSM, Ormas, Orsospol, Lembaga Legislatif dan Yudikatif maupun Instansi terkait sangat kompak dan respon cepat dalam pemeliharaan ketentraman dan ketertiban lingkungan.

**5.2 Arah Kebijakanyang ditempuh adalahsebagai berikut :**

1. Intensifikasi kegiatan keagamaan di masyarakat dan pemerintah.

Dalam hal ini FKDM melakukan kegiatan yang mana mengumpulkan para tokoh agama yang ada di Kabupaten Langkat untuk saling membahan agar kerukunan umat beragama yang ada di Kabupaten Langkat ini terus berjalan dengan baik tidak ada lagi saling gesekan.

1. Peningkatan keikutsertaan masyarakat dalam kompetisi keagamaan.

Dalam hal ini tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda dan para cendikiawan sering dilibatkan dalam hal kompetisi keagamaan.

1. Peningkatan kegiatan gotong royong di lingkungan masyarakat.

Dalam hal gotong royong tidak saja dari masyarakat yang ikut serta melainkan dari Pemerintah, Kepolisian, TNI dan Tokoh-tokoh pemudah saling ikut serta.

|  |
| --- |
| Tabel T-C.26 |
| Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | |  | |
| VISI : Menjadikan Langkat yang Maju, Sejahtera dan Religius melalui Pengembangan Pariwisata Infrastruktur yang Berkelanjutan | | | | | |
| MISI Ke 1 : Mewujudkan kerukunan, ketentraman, ketertiban dan pelestarian budaya dalam masyarakat sebagai penguatan ideologi bangsa | | | | | |
| Tujuan | | Sasaran | Strategi | | Arah Kebijakan |
| Terwujudnya peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan ketentraman dan ketertiban lingkungan | | Meningkatnya kapasitas pemberdayaan masyarakat dalam pemeliharaan ketentraman dan ketertiban lingkungan | Meningkatkan pemanfaatan wadah-wadah aktualisasi keagamaan | | Intensifikasi kegiatan keagamaan di masyarakat dan pemerintah |
| Peningkatan keikutsertaan masyarakat dalam kompetisi keagamaan |
|  | |  |  | |  |
| Misi ke 5 : Menciptakan reformasi birokrasi dan meningkatkan partisipasi publik dalam mendukung penyelenggaraan sistem tata kelola Pemerintahan yang baik dan bersih | | | | | |
|  |  |  | |  | |
| Tujuan | Sasaran | Strategi | | Arah Kebijakan | |
| Terciptanya reformasi birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan pemanfaatan sistem informasi dan teknologi | Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja keuangan pemerintah | Meningkatkan Profesionalitas Aparatur Pemerintah Daerah | | Penataan kepegawaian berbasis kompetensi | |

**BAB VI**

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

**6. 1. Rencana Program dan Kegiatan**

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu guna mencapai sasaran tujuan yang telah ditetapkan.Kegiatan-kegiatan tersebut merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan untuk merealisasikan program yang telah ditetapkan dan merupakan cerminan dari strategi konkrit untuk mencapai tujuan dan program.

Berdasarkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan, maka disusunlah rencana program dan kegiatan indikatif yang akan dilaksanakan oleh Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Langkat untuk kurun waktu 2019-2024 adalah sebagai berikut:

Program yang direncanakan oleh Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Langkat tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut **:**

Program terdiri dari beberapa kegiatan yang berupa:

1. Kerangka regulasi yang bertujuan untuk memfasilitasi, mendorong, maupun mengatur kegiatan pembangunan yang dilaksanakan sendiri oleh masyarakat.

2. Kerangka anggaran yang bertujuan untuk menyediakan barang dan jasa publik yang diperlukan masyarakat.

Sedangkan rincian kegiatan-kegiatan yang merupakan implementasi program SKPD, indikator kinerja dan pendanaan indikatif .

* 1. **Rencana Program**

1. Program Penaunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

2. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan

3. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik

4. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

5. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya

6. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial

**b. Rencana Kegiatan**

Kegiatan yang direncanakan oleh Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Langkat tahun 2019-2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

TABEL TC 27

**Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Langkat**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tujuan | Sasaran | Kode | | | | | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Program ( Outcome) / Kegiatan ( Out put ) | Satuan | Tahun Awal Perencanaan ( 2019 ) | Ketercapaian Kinerja Tahun 2020 | Terget Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | |
| Tahun - 2 | | Tahun - 3 | | Tahun - 4 | | Tahun - 5 | |
| Target Kinerja | Target ( Rp ) | Target Kinerja | Target ( Rp ) | Target Kinerja | Target ( Rp ) | Target Kinerja | Target ( Rp ) | Target Kinerja | Target ( Rp ) |
| 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2024 | |
| 1 | 2 | 3 | | | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  |  | 8 |  |  |  |  | Unsur Pemerintah Umum |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Terciptanya Masyarakat yang Mandiri | Meningkatkan Status Kemandirian Desa | 8 | 01 |  |  |  | Kesatuan Bangsa dan Politik |  |  | 3.679.484.226 | 4.685.163.518 |  | 4.921.078.919 |  | 5.720.260.204 |  | 6.580.425.226 |  | 8.178.002.100 |  | 30.084.929.967 |
| 8 | 01 | 01 |  |  | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |  |  | 3.679.484.226 | 2.646.263.518 |  | 2.755.051.931 |  | 2.932.072.814 |  | 2.984.673.963 |  | 3.498.002.100 |  | 14.816.064.326 |
| 8 | 01 | **01** | **202** |  | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** |  |  | 3.031.218.593 | 1.968.693.000 |  | 1.855.819.552 |  | 1.854.652.963 |  | 1.861.493.963 |  | 1.900.502.100 |  | 9.441.161.578 |
| 8 | 01 | 01 | 202 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | OB | 1.915.686.000 | 1.880.693.000 | 210 | 1.785.439.552 | 210 | 1.789.492.963 | 210 | 1.789.493.963 | 210 | 1.804.502.100 | 840 | 9.049.621.578 |
| 8 | 01 | 01 | 202 | 02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Dokumen | 1.854.126.000 | 70.000.000 | 60 | 52.380.000 | 60 | 47.160.000 | 60 | 49.000.000 | 60 | 65.000.000 | 240 | 283.540.000 |
| 8 | 01 | 01 | 202 | 05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Dokumen | 61.560.000 | 3.000.000 | 12 | 3.000.000 | 12 | 3.000.000 | 12 | 4.000.000 | 12 | 6.000.000 | 48 | 19.000.000 |
| 8 | 01 | 01 | 202 | 06 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan | Dokumen | - | 6.000.000 | 12 | 6.000.000 | 12 | 6.000.000 | 12 | 8.000.000 | 12 | 10.000.000 | 48 | 36.000.000 |
| 8 | 01 | 01 | 202 | 07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD | Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Dokumen | - | 9.000.000 | 12 | 9.000.000 | 12 | 9.000.000 | 12 | 11.000.000 | 12 | 15.000.000 | 48 | 53.000.000 |
| 8 | 01 | **01** | **205** |  | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** |  |  | - | 100.000.000 |  | 97.125.000 |  | 180.000.000 |  | 230.000.000 |  | 300.000.000 |  | 907.125.000 |
| 8 | 01 | 01 | 205 | 02 | Pengadaan Pakaian Dinas Harian ( PDH ) | Tersedianya Pakaian Dinas Harian ( PDH ) | Stel | 120.000.000 | 50.000.000 | 35 | 75.000.000 | 35 | 80.000.000 | 35 | 110.000.000 | 35 | 150.000.000 | 140 | 465.000.000 |
| 8 | 01 | 01 | 205 | 09 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Orang |  | 50.000.000 | 10 | 22.125.000 | 10 | 100.000.000 | 10 | 120.000.000 | 10 | 150.000.000 | 40 | 442.125.000 |
| 8 | 01 | **01** | **206** |  | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** |  |  | 120.000.000 | 266.301.718 |  | 192.981.679 |  | 277.115.151 |  | 214.750.000 |  | 406.000.000 |  | 1.357.148.548 |
| 8 | 01 | 01 | 206 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Paket | 534.464.833 | 5.915.900 | 1 | 5.914.154 | 1 | 5.913.383 | 1 | 6.500.000 | 1 | 8.000.000 | 4 | 32.243.437 |
| 8 | 01 | 01 | 206 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Paket | 5.415.900 | 17.129.375 | 1 | 17.129.313 | 1 | 17.129.647 | 1 | 19.000.000 | 1 | 25.000.000 | 4 | 95.388.335 |
| 8 | 01 | 01 | 206 | 03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Tersedianya Peralatan Rumah Tangga | Paket | 16.629.375 | 7.943.358 | 1 | 7.943.194 | 1 | 7.942.337 | 1 | 9.000.000 | 1 | 15.000.000 | 4 | 47.828.889 |
| 8 | 01 | 01 | 206 | 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Terlaksanaya Bahan Logistik Kantor | Paket | 6.743.358 | 55.000.000 | 1 | 45.250.000 | 1 | 50.650.000 | 1 | 66.200.000 | 1 | 85.000.000 | 4 | 302.100.000 |
| 8 | 01 | 01 | 206 | 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan | Paket | 37.891.500 | 18.058.200 | 1 | 18.058.180 | 1 | 18.082.276 | 1 | 20.000.000 | 1 | 28.000.000 | 4 | 102.198.656 |
| 8 | 01 | 01 | 206 | 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Dokumen | 18.058.200 | 18.000.000 | 12 | 12.000.000 | 12 | 12.000.000 | 12 | 12.000.000 | 12 | 20.000.000 | 48 | 74.000.000 |
| 8 | 01 | 01 | 206 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Laporan | 18.000.000 | 144.254.885 | 12 | 86.686.838 | 12 | 165.397.508 | 12 | 82.050.000 | 12 | 225.000.000 | 48 | 703.389.231 |
| 8 | 01 | **01** | **207** |  | **Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** |  |  | 431.726.500 | 10.000.000 |  | 35.000.000 |  | 50.000.000 |  | 50.000.000 |  | 70.000.000 |  | 215.000.000 |
| 8 | 01 | 01 | 207 | 05 | Pengadaan Mebel | Tersedianya Mebel | Paket | 77.000.000 | 10.000.000 | 1 | 35.000.000 | 1 | 50.000.000 | 1 | 50.000.000 | 1 | 70.000.000 | 4 | 215.000.000 |
| 8 | 01 | 01 | 207 | 06 | Pengadan Peralatan dan Mesin Lainnya | Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya | Paket | 77.000.000 | 30.000.000 | 1 | 35.000.000 | 1 | 50.000.000 | 1 | 25.000.000 | 1 | 50.000.000 | 4 | 190.000.000 |
| 8 | 01 | **01** | **208** |  | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** |  |  | 36.500.000 | 187.068.800 |  | 221.438.800 |  | 237.448.800 |  | 255.760.000 |  | 300.000.000 |  | 1.201.716.400 |
| 8 | 01 | 01 | 208 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber daya Air dan Listrik | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Laporan | 178.368.760 | 62.068.800 | 12 | 62.188.800 | 12 | 58.348.800 | 12 | 70.000.000 | 12 | 85.000.000 | 48 | 337.606.400 |
| 8 | 01 | 01 | 208 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | Laporan | 67.868.760 | 125.000.000 | 124 | 159.250.000 | 124 | 179.100.000 | 124 | 185.760.000 | 124 | 215.000.000 | 496 | 864.110.000 |
| 8 | 01 | **01** | **209** |  | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** |  |  | 110.500.000 | 114.200.000 |  | 352.686.900 |  | 332.855.900 |  | 372.670.000 |  | 521.500.000 |  | 1.693.912.800 |
| 8 | 01 | 01 | 209 | 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Unit | 205.699.000 | 3.200.000 | 12 | 166.686.900 | 12 | 136.855.900 | 12 | 110.000.000 | 12 | 135.000.000 | 48 | 551.742.800 |
| 8 | 01 | 01 | 209 | 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Unit | 6.000.000 | 5.000.000 | 19 | 80.000.000 | 19 | 90.000.000 | 19 | 100.000.000 | 19 | 120.000.000 | 76 | 395.000.000 |
| 8 | 01 | 01 | 209 | 03 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Unit | 148.599.000 | 6.000.000 | 19 | 6.000.000 | 19 | 6.000.000 | 19 | 12.670.000 | 19 | 16.500.000 | 76 | 47.170.000 |
| 8 | 01 | 01 | 209 | 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Paket | 6.100.000 | 100.000.000 | 1 | 100.000.000 | 1 | 100.000.000 | 1 | 150.000.000 | 1 | 250.000.000 | 4 | 700.000.000 |
| 8 | 01 | **02** |  |  | **Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan** | **Jumlah FKUB** |  | 45.000.000 | 470.000.000 |  | 499.900.476 |  | 526.123.795 |  | 752.939.200 |  | 1.095.000.000 |  | 3.343.963.471 |
| **Cakupan Kegiatan Pengembangan Wawasan Kebangsaan yang Melibat Partisipasi Masyarakat** | 207.979.050 |
| 8 | 01 | 02 | 2.01 |  | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan | Cakupan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan |  | 257.979.050 | 470.000.000 |  | 499.900.476 |  | 526.123.795 |  | 752.939.200 |  | 1.095.000.000 |  | 3.343.963.471 |
| 8 | 01 | 02 | 2.01 | 01 | Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | Tersusunnya Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | Dokumen | 207.979.050 | 150.000.000 | 12 | 164.894.349 | 12 | 109.999.748 | 12 | 240.000.000 | 12 | 350.000.000 | 48 | 1.014.894.097 |
| 8 | 01 | 02 | 2.01 | 04 | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | Terlaksananya Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | Orang | 50.000.000 | 320.000.000 | 114 | 335.006.127 | 114 | 416.124.047 | 114 | 512.939.200 | 114 | 745.000.000 | 456 | 2.329.069.374 |
| 8 | 01 | **03** |  |  | **Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik** | **Cakupan Kegiatan Pendidikan Politik yang melibatkan Partisipasi Masyarakat/Partai Politik** |  | 315.000.000 | 845.000.000 |  | 908.565.166 |  | 1.648.695.850 |  | 1.897.573.850 |  | 2.345.000.000 |  | 7.644.834.866 |
| 8 | 01 | 03 | 2.01 |  | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik. | **Cakupan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik.** |  | 68.979.083 | 845.000.000 |  | 908.565.166 |  | 1.648.695.850 |  | 1.897.573.850 |  | 2.345.000.000 |  | 7.644.834.866 |
| 8 | 01 | 03 | 2.01 | 03 | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | Terlaksananya Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | Orang | 68.979.083 | 845.000.000 | 54.125 | 908.565.166 | ###### | 1.648.695.850 | 54.125 | 1.897.573.850 | ###### | 2.345.000.000 | ###### | 7.644.834.866 |
| 8 | 01 | **04** |  |  | **Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan** | **Cakupan Organisasi Masyarakat yang mendapatkan Pembinaan** |  | 840.000.000 | 50.000.000 |  | 55.069.510 |  | 35.010.407 |  | 160.000.000 |  | 215.000.000 |  | 515.079.917 |
| 8 | 01 | 04 | 2.01 |  | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan | Cakupan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan |  | 39.865.600 | 50.000.000 |  | 55.069.510 |  | 35.010.407 |  | 160.000.000 |  | 215.000.000 |  | 515.079.917 |
| 8 | 01 | 04 | 2.01 | 01 | Penyusunan Program Kerja dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | Tersusunnya Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | Dokumen | 39.865.600 | 50.000.000 | 12 | 55.069.510 | 12 | 35.010.407 | 12 | 160.000.000 | 12 | 215.000.000 | 48 | 515.079.917 |
| 8 | 01 | **05** |  |  | **Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya** | **Jumlah Kasus Pekat** |  | 45.000.000 | 393.900.000 |  | 413.518.984 |  | 317.792.604 |  | 415.000.000 |  | 525.000.000 |  | 2.065.211.588 |
| 8 | 01 | 05 | 2.01 |  | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya | Cakupan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya |  | 145.746.500 | 393.900.000 |  | 413.518.984 |  | 317.792.604 |  | 415.000.000 |  | 525.000.000 |  | 2.065.211.588 |
| 8 | 01 | 05 | 2.01 | 01 | Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | Tersusunnya Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | Dokumen | 145.746.500 | 110.000.000 | 12 | 115.771.133 | 12 | 114.999.771 | 12 | 130.000.000 | 12 | 155.000.000 | 48 | 625.770.904 |
| 8 | 01 | 05 | 2.01 | 03 | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | Terlaksananya Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | Orang | - | 135.000.000 | 139 | 140.771.014 | 139 | 95.321.921 | 139 | 120.000.000 | 139 | 145.000.000 | 556 | 636.092.935 |
| 8 | 01 | 05 | 2.01 | 4 | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | Terlaksananya Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | Orang | 16.989.500 | 48.900.000 | 150 | 55.000.000 | 150 | 41.935.534 | 150 | 60.000.000 | 150 | 85.000.000 | 600 | 290.835.534 |
| 8 | 01 | 05 | 2.01 | 5 | Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | Laporan | 72.795.500 | 100.000.000 | 12 | 101.976.837 | 12 | 65.535.378 | 12 | 105.000.000 | 12 | 140.000.000 | 48 | 512.512.215 |
| 8 | 01 |  |  |  | **Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial** | **Persentase Konflik Sosial yang tertangani** |  | 100.000.000 | 280.000.000 |  | 288.972.852 |  | 260.564.734 |  | 370.238.213 |  | 500.000.000 |  | 1.699.775.799 |
| 8 | 01 | **06** |  |  | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penaganan Konflik Sosial | Cakupan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penaganan Konflik Sosial |  | 185.695.400 | 280.000.000 |  | 288.972.852 |  | 260.564.734 |  | 370.238.213 |  | 500.000.000 |  | 1.699.775.799 |
| X | XX | 06 | 2.01 | 01 | Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, Serta Penaganan Konflik di Daerah | Tersusunnya Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | Dokumen | 185.695.400 | 255.000.000 | 12 | 263.703.606 | 12 | 184.335.015 | 12 | 180.000.000 | 12 | 250.000.000 | 48 | 1.133.038.621 |
| X | XX | 06 | 2.01 | 04 | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, Serta Penanganan Konflik DI Daerah | Terlaksananya Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | Orang | 41.158.000 | 25.000.000 | 40 | 25.269.246 | 40 | 76.229.719 | 40 | 190.238.213 | 40 | 250.000.000 | 160 | 566.737.178 |
| X | XX | 06 | 2.01 | 05 | Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, Serta Penanganan Konflik DI Daerah | Terlaksananya Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, Serta Penanganan Konflik DI Daerah | Laporan | 12 | 100.000.000 | 12 | 154.794.035 | 12 | 156.976.837 | 12 | 165.000.000 | 12 | 200.000.000 | 60 | 776.770.872 |

**BAB VII**

**KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Biasanya, indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukurnya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya apabila didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolah data kinerja yang memadai maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal (reliable) mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya. Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD merupakan indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Perumusan indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD dilakukan dengan melakukan review terhadap tujuan dan sasaran dalam RPJMD untuk selanjutnya dilakukan identifikasi bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam RPJMD.

Indikator Kinerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Langkat yang pencapaiannya berkait langsung dengan pencapaian Indikator Kinerja Perangkat Daerah sebagaimana tabel berikut dan Indikator Kinerja Program yang dilaksanakan sebagaimana tabel 7.1 berikut:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tabel T-C.28 | | | | | | | | |  |
| Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| No | Indikator Kinerja Sasaran RPJMD Terkait | | Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD | Anggaran pada Tahun Ke - | | | | | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD |
| Indikator | Satuan | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| 1 | Cakupan Organisasi Masyarakat yang mendapatkan pembinaan | % | 44 | 54 | 64 | 74 | 84 | 94 |  |

**BAB VIII**

**PENUTUP**

Perubahan Rencana Startegis ( Renstra ) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik abupaten Langkat merupakan hasil dari penjabaran Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) Kabupaten Langkat Tahun 2019 – 2024. Perubahan Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Langkat Tahun 2019 – 2024 secara teknis menjadi pedPage | **26**oman dalam perencanaan Tahunan bagi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik kabupaten Langkat yang tertuang dalam Rencana Kerja ( Renja ) hingga tahun 2024.

Untuk itu berbagai stategi yang telah di pilih baik yang berupa kebijakan program dan kegiatan dalam dokumen perubahan Rencana Strategis ini harus dapat diimplemntasikansecara tuntas dan jelas kedalam rencana kegiatan tahunan agar bisa mewujudkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan dalam perubahan RPJMD Kabupaten Langkat sampai dengan Tahun 2024.

Pedoman transisi dalam dokumen Perubahan Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik kabupaten Langkat Tahun 2019 -2024 menjadi panduan dan alur untuk menggambil suatu kebijakan dan program kerja tahunan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Langkat yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya hingga tahun 2024. Setelah berakhirnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) Kabupaten Langkat 2019 – 2024 pada tahun 2024, perlu di susun RPJMD Kabupaten Langkat 2025 – 2029 sebagai acuan bagi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan 5 ( Lima ) tahhun berikutnya. Pada masa transisi tersebut, diperlukan sebuah acuan bagi penyusunan perencanaan tahun 2025. Acuan penyusunan Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik kabupaten Langkat Tahun 2025 akan didasarkan pada RPJMD Kabupaten Langkat Priode berikutnya, Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Utara 2024 – 2028 dan Renstra Kementrian tahun 2025.

Perubahan Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Langkat Tahun 2019 – 2024 ini merupakan panduan bagi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Langkat dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan demi mewujudkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah di tetapkan dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Langkat sampai dengan tahun 2024. Untuk itu perlu kesepakatan, kerjasama, transparansi, konsistensi dan inovasi, serta rasa tanggung jawab yang tinggi demi tercapainya target-target yang telah ditetapkan dalam perubahan Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Langkat Tahun 2019 – 2024.

Pada akhirnya keberhasilan/ketidak berhasilan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Langkat sangat tergantung pada partisipasi aktif seluruh lapisan masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan, serta sikap mental, tekad, semangat dan ketaatan azas para penyelenggara Pemerintah Daerah. Semoga Allah SWT senantiasa meridhoi langkah kami dalam melaksanakan agenda pembangunan menuju “terwujudnya masyarakat yang maju, sejahtera dan religius berwawasan lingkungan. Pelaksanaan Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Langkat ini sangat memerlukan partisipasi, semangat, dan komitmen dari seluruh aparatur Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Langkat, karena akan menentukan keberhasilan pencapaian kinerja program dan kegiatan yang telah disusun. Dengan demikian, Renstra ini tidak hanya menjadi dokumen administrasi saja, karena secara substansial merupakan pencerminan aspirasi pembangunan yang memang dibutuhkan oleh stakeholders sesuai dengan visi dan misi yang ingin dicapai.